

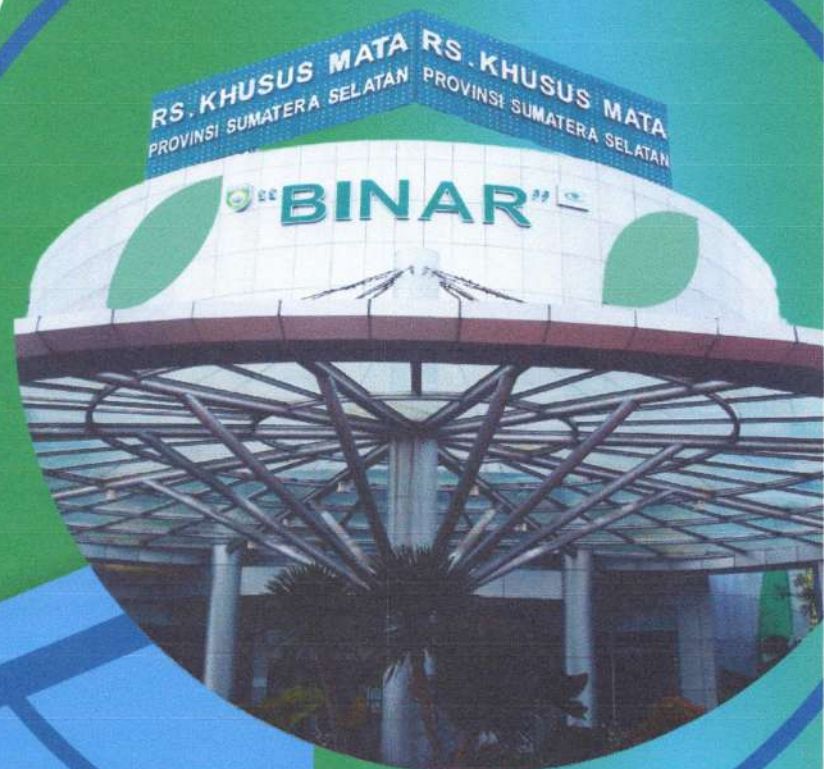
RSK MATA 
MASYARAKAT "BINAR"
PROVINSI SUMATERA SELATAN



RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini disusun untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) RSK. Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 24 Agustus 2026
Direktur RS Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Lady Kavotiner, Sp.M., MARS
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 19800924 200803 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026	10
2.1 Kondisi Umum Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan	10
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TW 2026.	11
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.5 Isu Strategis.....	31
2.6 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026	32
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	36
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	13
Tabel 2.2	T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan	16
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan	26
Tabel 2.4	T-C.31 Review Terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026	33
Tabel 2.5	T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel 3.1	Rincian Komponen Belanja Rencana Kerja Perubahan SKPD 2026	42

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari dokumen Rencana Strategis Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Renja Perubahan ini sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dibidang kesehatan utamanya perumahsakitan.

Dalam prosesnya, Perencanaan Pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, yang lebih dikenal dengan istilah THIS.

Penyusunan Renja ini selaras dengan Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan serta penyusunan Rencana Kerja Perubahan.

Renja Perubahan ini ditetapkan menjadi acuan dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Seluruh tahapan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 diinput secara sistematis melalui aplikasi SIPD RI.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.105)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185).
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2020 Tanggal 15 Juli 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;

20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1013/KPTS/DINKES/ 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Renja Perubahan Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak dalam rangka terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan di Rumah sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan baik dalam dokumen perencanaan tingkat nasional, regional maupun provinsi.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah pada Renstra Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam menjembatani pembangunan Sumatera Selatan, dengan fokus tahun 2026 sesuai Tahapan Renstra dalam mendukung program-program strategis Sumatera Selatan.
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi dalam proses pendukung penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
- (3) Mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata

- Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data yang terkini dan akurat.
- (4) Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWYULAN II TAHUN 2026
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWYULAN II TAHUN 2026

2.1 Kondisi Umum Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pelayanan kesehatan mata masyarakat dengan kode RS 1671323. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Menkes RI Nomor 371/Menkes/SK/IV/2008 Tahun 2008 RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan adalah Rumah Sakit Khusus Kelas B.

RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang, berawal dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang kemudian di Tahun 2001 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tanggal 31 Mei 2001 berubah status menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan pada Tahun 2012 pindah tempat ke Jalan Kolonel H. Burlian Km. 6 Palembang.

RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas gedung dan bangunan 4.646 m² dengan luas lahan 10.948 m². Gedung RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dibangun Tahun 2010 dan mulai beroperasi pada Tahun 2012.

Mulai Desember 2013, sesuai perkembangan RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/BPKAD/2013 Tahun 2013 RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status bertahap dan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD/2016 Tahun 2016.

RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan telah mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit dari Gubernur Sumatera Selatan

melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 03022200317850003 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dengan klasifikasi rumah sakit Tipe B berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 448/DPMPTSP.V/X/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 dan telah terakreditasi “**PARIPURNA**” oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI), Nomor LARSI/SERTIFIKAT/ 122/03/2023 Tahun 2023.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 sampai dengan Triwulan II. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta merumuskan langkah perbaikan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program utama yang dilaksanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pengadaan barang milik daerah, serta peningkatan pelayanan BLUD. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta operasional pelayanan rumah sakit.

Sementara itu, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan difokuskan pada penyediaan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat baik melalui pelayanan di rumah sakit maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung. Program ini juga mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Meskipun sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Selengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

Lembar 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (5)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	50.072.526.722	48.687.616.874	45.952.585.316	94,38 %	36.706.085.650	132.731.197.688	33.182.799.422
1 01 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.868.367.000	1.326.723.000	1.012.498.000	76,32 %	448.560.000	3.329.425.000	832.356.250
1 01 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	100%	1.709.367.000	1.326.723.000	1.012.498.000	76,32 %	448.560.000	3.170.425.000	792.606.250

1	01	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	3.800 siswa	1.152.995.100	927.173.000	862.377.235	93,01 %	424.282.400	2.439.654.735	609.913.684
								51.225.521.822	49.614.789.874	46.814.962.551	94,36 %	37.130.368.050	135.170.852.423	33.792.713.106

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.30,
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan

N O	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026 (s/d TW II)	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pelaksanaan Program Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Kelompok Target (PENGGARIS)		Persentase Program Penggaris (Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Siswa)	90%	90%	90%	90%	98,65%	93%	0%	100%	Sesuai Perencanaan Realisasi Kegiatan Penggaris dilaksanakan pada Tahun Ajaran Baru Sekolah, yaitu pada Bulan Agustus atau Triwulan III TA 2026
			Jumlah Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Sekolah yang menjadi Mitra kegiatan Penggaris)	100%	100%	100%	100%					

2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase Penanganan Komplain Sesuai Prosedur	85%	100%	100%	100%	100%	87%	87%	100%	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 87 atau sebesar 102% dari target yang ditetapkan sebesar 85. Hasil ini mencerminkan kualitas pelayanan yang telah memenuhi standar, didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta peningkatan sarana prasarana dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang berjalan efektif.
3	Persentase Capaian SPM		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	90%	90%	90%	90%	90%	89,82 %	90,24%	100%	Keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit didukung oleh komitmen manajemen yang kuat, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4	Persentase Kunjungan Pasien ke RSK Mata		Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	40.250 Pasien	46%	200%	Pada Triwulan I, capaian kunjungan pasien menurun dari target akibat berkurangnya hari pelayanan efektif selama Ramadhan dan Idul Fitri serta perubahan pola kunjungan masyarakat yang cenderung menunda pelayanan non-urgensi. Pada Triwulan II, kunjungan pasien kembali meningkat seiring normalnya hari pelayanan dan aktivitas masyarakat, sehingga capaian kinerja menunjukkan perbaikan.
			Persentase Kunjungan Pasien ke RS	100%	100%	100%	100%	100%				

5	Persentase Peningkatan Kompetensi Layanan Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Target Kompetensi Layanan Tingkat Dasar, Madya, Utama dan Peripurna	Paripurna 80%	Paripurna 100%	Paripurna	Faktor pendukung dipertahankannya Akreditasi Paripurna adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, penerapan standar akreditasi secara konsisten, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu serta keselamatan pasien, peningkatan kompetensi SDM, penerapan manajemen risiko dan SPIP, kepatuhan terhadap SOP dan regulasi, serta pelaksanaan perbaikan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pelayanan.
6	Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi sesuai Standar	Persentase Pemenuhan SDM Spesialis dan Sub Spesialis Persentase SDM Yang Telah Menduduki Jabatan Sesuai Kualifikasi Pendidikan Persentase Staf yang Mengikuti Pelatihan/Diklat Minimal 20 Jam Per Tahun	80% 80% 80%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	52,50 % 5% Capaian sebesar 5% terhadap target 20 JPL pada triwulan kedua merupakan kondisi yang masih wajar, mengingat pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi umumnya belum berjalan optimal pada triwulan I dan II. Hal ini disebabkan oleh tahapan perencanaan, penjadwalan, serta penyediaan kegiatan yang baru mulai dilaksanakan. Dengan demikian, capaian tersebut belum mencerminkan kinerja keseluruhan dan masih memiliki potensi peningkatan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan-bulan berikutnya dalam triwulan berjalan

7	Persentase Survey Kepuasan Mahasiswa	Persentase Survey Kepuasan Mahasiswa	75%	75%	75%	75%	100	100%	85%	200%	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 87 atau sebesar 102% dari target yang ditetapkan sebesar 85. Hasil ini mencerminkan kualitas pelayanan yang telah memenuhi standar, didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta peningkatan sarana prasarana dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang berjalan efektif.
8	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	Tidak ada temuan BPK sampai dengan Triwulan II TA 2026
9	Capaian Nilai SAKIP	Capaian Nilai SAKIP	65	81 (A)	81 (A)	81 (A)	CC (52,3%)	CC (52,3 %)	CC (52,3%)	100%	Rendahnya capaian SAKIP dipengaruhi oleh pelaksanaan penilaian yang baru pertama kali dilakukan pada 2024, sehingga pemenuhan dokumen dan keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja belum optimal. Implementasi siklus manajemen kinerja dan pemahaman SDM terhadap SAKIP juga masih perlu diperkuat. Perbaikan melalui penguatan manajemen kinerja, integrasi data, dan pemanfaatan hasil evaluasi terus dilakukan secara bertahap.

10	Jumlah Pendapatan BLUD	Persentase Pendapatan BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,44%	114%	65,71% (sebelum Perubahan) 54,76 (setelah perubahan)	100%	Realisasi pendapatan Rumah Sakit Khusus Mata sebesar 65,71% (sebelum perubahan) pada triwulan II menunjukkan tercapainya indikator kinerja keuangan BLUD dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur. Capaian ini didukung oleh optimalisasi layanan unggulan, peningkatan pelayanan pasien umum dan BPJS Kesehatan, penguatan jejaring rujukan, serta pengelolaan dan penagihan klaim BPJS yang semakin tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
		Persentase Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%		101,32%	100%	

Berdasarkan Tabel T-C.30, sampai dengan Triwulan II tahun 2016 sebagian besar kinerja pelayanan di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian menuju angka target yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian pada sebagian besar indikator kinerja, seperti persentase capaian SPM Rumah Sakit sebesar 90.24%, dimana capaian ini didukung oleh komitmen manajemen yang kuat, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Capaian juga terlihat pada indikator pendapatan BLUD yang telah mencapai target sebesar 65.71%, yang mana capaian ini didukung oleh optimalisasi layanan unggulan, peningkatan pelayanan pasien umum dan BPJS Kesehatan, penguatan jejaring rujukan, serta pengelolaan dan penagihan klaim BPJS yang semakin tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Demikian juga halnya dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 87 atau sebesar 102% dari target yang ditetapkan sebesar 85. Hasil ini mencerminkan kualitas pelayanan yang telah memenuhi standar, didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, serta peningkatan sarana prasarana dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat yang berjalan efektif. Sedangkan untuk indikator survei kepuasan mahasiswa telah tercapai 85%, telah melampaui target sebesar 75%, yang mana di rumah sakit jejaring pendidikan didukung oleh kerja sama yang baik antara institusi pendidikan dan rumah sakit jejaring, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, peran aktif pembimbing klinik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, pengelolaan pendidikan klinik yang terkoordinasi dengan baik dan responsivitas rumah sakit terhadap kebutuhan mahasiswa turut berkontribusi terhadap tingkat kepuasan yang optimal.

Sedangkan untuk indikator peningkatan kompetensi layanan rumah sakit, capaian kunjungan saat ini sebesar 46%. Dimana pada Triwulan I, capaian kunjungan pasien menurun dari target akibat berkurangnya hari pelayanan efektif selama Ramadhan dan Idul Fitri serta perubahan pola kunjungan masyarakat yang cenderung menunda pelayanan *non-urgensi*. Pada Triwulan II, kunjungan pasien kembali meningkat seiring normalnya hari pelayanan dan aktivitas masyarakat,

sehingga capaian kinerja menunjukkan perbaikan. Sedangkan presentase operasi mata mencapai 996 kunjungan pada Triwulan I dan 836 kunjungan pada Triwulan II, sehingga total capaian hingga Triwulan II sebanyak 1.832 kunjungan atau 50,21% dari target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan operasi tetap berjalan secara stabil dan mampu mempertahankan tingkat kunjungan pasien. Capaian kunjungan pasien operasi tersebut didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan operasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta kesiapan jadwal dan pelayanan kamar operasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target standar yang ditetapkan, seperti persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar yang baru mencapai 5% terhadap target 20 JPL, dimana pada triwulan kedua merupakan kondisi yang masih wajar, mengingat pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi umumnya belum berjalan optimal pada triwulan I dan II. Hal ini disebabkan oleh tahapan perencanaan, penjadwalan, serta penyesuaian kegiatan yang baru mulai dilaksanakan. Dengan demikian, capaian tersebut belum mencerminkan kinerja keseluruhan dan masih memiliki potensi peningkatan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan-bulan berikutnya dalam triwulan berjalan. Rumah sakit tetap melakukan upaya berkelanjutan melalui perencanaan, fasilitasi pelatihan, dan monitoring pemenuhan kompetensi guna meningkatkan capaian pada periode berikutnya.

Selain itu, Rendahnya capaian SAKIP dipengaruhi oleh pelaksanaan penilaian yang baru pertama kali dilakukan pada 2024, sehingga pemenuhan dokumen dan keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja belum optimal. Implementasi siklus manajemen kinerja dan pemahaman SDM terhadap SAKIP juga masih perlu diperkuat. Perbaikan melalui penguatan manajemen kinerja, integrasi data, dan pemanfaatan hasil evaluasi terus dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Kelompok Target (PENGGARIS) masih belum tercapai sampai dengan triwulan II, karena sesuai perencanaan realisasi kegiatan penggaris dilaksanakan pada Tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Bulan Agustus atau Triwulan III TA 2026.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan RSKMM menunjukkan perkembangan yang positif dan diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian target kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.4 Permasalahan dan Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sektor kesehatan sesuai RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu RSKMM Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan analisa yang menggambarkan situasi eksternal dan internal rumah sakit. Dengan adanya analisa ini maka RSKMM Provinsi Sumatera Selatan dapat menentukan strategi sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit. Analisa ini terdiri dari aspek internal dan eksternal rumah sakit. Untuk aspek internal terdiri dari Kekuatan/*Strengths* (S) dan Kelemahan/*Weaknesses* (W), sedangkan untuk aspek eksternal rumah sakit terdiri dari Peluang/*Opportunities*(O), dan Ancaman/ *Threats* (T). Dalam menggambarkan analisa ini hal-hal yang menjadi perhatian utama bagi manajemen RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat dituangkan dalam analisa ini.

Faktor Internal

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Rumah sakit merupakan rumah sakit khusus mata milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fokus pelayanan spesialisik mata.
2. Memiliki tenaga medis spesialis mata dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang pelayanan kesehatan mata.
3. Tersedianya pelayanan unggulan kesehatan mata seperti operasi katarak, retina, glaukoma, dan pelayanan refraksi.
4. Memiliki dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan kesehatan rujukan mata.
5. Sudah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pelayanan

berbasis digital/SIMRS dalam mendukung pelayanan.

6. Menjadi salah satu rumah sakit rujukan pelayanan mata di wilayah Sumatera Selatan.
7. Memiliki jejaring kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan BPJS Kesehatan.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan tertentu masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi kesehatan mata.
2. Keterbatasan jumlah SDM tertentu dibandingkan dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien.
3. Pemeliharaan alat kesehatan membutuhkan biaya tinggi dan ketergantungan terhadap pihak penyedia.
4. Masih terdapat keterbatasan kapasitas ruang pelayanan dan ruang penunjang.
5. Promosi dan edukasi pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat belum optimal.
6. Pengembangan layanan subspecialis dan inovasi pelayanan masih memerlukan penguatan.
7. Ketergantungan pendapatan rumah sakit terhadap klaim BPJS Kesehatan cukup tinggi.

Faktor Eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan mata akibat meningkatnya angka penyakit mata, terutama katarak dan komplikasi diabetes melitus.
2. Dukungan program pemerintah terhadap penurunan angka kebutaan dan peningkatan kesehatan indera penglihatan.

3. Perkembangan teknologi kesehatan mata yang semakin modern dan mendukung peningkatan mutu layanan.
4. Peluang pengembangan kerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan mata.
6. Potensi pengembangan pelayanan unggulan dan pelayanan subspesialis mata.
7. Dukungan transformasi digital kesehatan nasional dalam peningkatan pelayanan rumah sakit.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Persaingan pelayanan kesehatan mata dengan rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lain yang memiliki layanan sejenis.
2. Perubahan regulasi dan kebijakan pembiayaan kesehatan nasional yang dapat memengaruhi pendapatan rumah sakit.
3. Perkembangan teknologi alat kesehatan yang cepat sehingga membutuhkan investasi besar.
4. Kenaikan harga alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
5. Risiko gangguan sistem teknologi informasi dan keamanan data pelayanan kesehatan.
6. Tingkat harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit semakin tinggi.
7. Ancaman penyakit degeneratif dan peningkatan kasus kronis yang berdampak pada meningkatnya beban pelayanan kesehatan.

Tabel 2.3 PEMETAAN PERMASALAHAN

No	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya pemanfaatan RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mata	Sistem rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS masih menjadi kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan di RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan mengingat pasien diharuskan dulu untuk dilayani pada fasilitas layanan kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang masih belum memadai. Jumlah SDM kesehatan yang belum mencapai angka standar sesuai dengan standar kompetensi rumah sakit. Belum optimalnya promosi dan sosialisasi tentang layanan kesehatan mata, seperti : operasi lasik. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengobatan mata.
2	Ketersediaan alat kesehatan yang belum mencukupi untuk mendukung pelayanan rumah sakit khusus mata	Sebagian alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit sudah lama dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi kedokteran yang berkembang dengan cepat, seperti : Alat LASIK yang terbaru SMILE Pro

	Upaya pengembangan pelayanan menjadi Rumah Sakit dengan pelayanan umum lainnya	Dalam hal penambahan gedung layanan seperti : Gedung UGD dan Penunjang yang membutuhkan anggaran yang besar, kebutuhan ini masih dalam proses usulan didalam APBD untuk anggaran 5 (lima) tahun kedepan, yang sebelumnya usulan relokasi UGD ke area depan rumah sakit dan gedung penunjang telah diajukan sejak tahun sebelumnya namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran pembangunan. Masih banyaknya dibutuhkan tenaga kesehatan guna pengembangan pelayanan mata dan non mata sehingga rumah sakit diperlukan penambahan tenaga kesehatan melalui rekrutmen PNS dan PPPK Provinsi Sumatera Selatan.
--	---	---

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun dari eksternal yang dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Permasalahan Internal

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Masih kurangnya jumlah SDM kesehatan

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh rumah sakit adalah masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis mata dan subspesialis. Penambahan tenaga spesialis/subspesialis ini guna menunjang klasifikasi RS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Rasio tenaga apoteker belum ideal.

Rasio tenaga apoteker saat ini belum ideal jika dibandingkan dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan formasi SDM dan peningkatan beban kerja seiring bertambahnya volume pelayanan. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pelayanan farmasi klinik dan distribusi obat, sehingga perlu dilakukan penambahan tenaga apoteker secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Unit Gawat Darurat (UGD) saat ini masih terletak di bagian belakang gedung utama, sehingga akses pasien gawat darurat belum sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, sehingga memerlukan penataan ulang agar lebih mudah dijangkau dari pintu masuk utama. Kondisi ini berpotensi menghambat akses pasien gawat darurat yang memerlukan penanganan cepat

Upaya perbaikan telah diusulkan sejak tahun sebelumnya melalui rencana pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit, namun hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut dan perencanaan anggaran. Kondisi gedung penunjang (Laboratorium, Gizi dan Farmasi) saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik dari aspek luas ruang, ventilasi, maupun tata letak yang sesuai dengan ketentuan teknis Kementerian Kesehatan. Selain itu saat ini belum tersedia ruang arsip khusus yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan administrasi, sehingga proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen belum berjalan secara tertib dan sesuai standar tata naskah dinas.

Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut juga mutlak dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan akreditasi rumah sakit sebagai proses standarisasi terhadap mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit.

4. Aspek Keuangan dan Pembiayaan, dimana RSKMM masih ketergantungan tinggi pada pendapatan klaim BPJS Kesehatan. Likuiditas keuangan terbatas, sehingga menyulitkan pengadaan alat berteknologi tinggi mengingat sebagian alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit sudah lama dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi kedokteran yang berkembang dengan cepat.

5. Aspek Sistem Informasi dan Teknologi

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) telah terintegrasi antar unit pelayanan. Sebagian besar petugas telah kompeten dalam pemanfaatan rekam medis elektronik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yang bersumber dari stabilitas dan keandalan jaringan internet, yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelayanan Aspek Pelayanan dan Citra Rumah Sakit.

6. Aspek Pelayanan dan Citra Rumah Sakit (Masih kurangnya kegiatan promosi rumah sakit)

Masih lemahnya kegiatan/upaya untuk pemasaran pelayanan rumah sakit menjadikan masyarakat banyak belum mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan di RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, terutama terhadap pengembangan pelayanan baru atau pelayanan unggulan yang ada di rumah sakit.

B. Permasalahan Eksternal

1. Aspek Kebijakan dan Regulasi

- Perubahan kebijakan pemerintah pusat atau daerah terkait pembiayaan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang mempengaruhi tarif dan klaim pelayanan mata.
- Regulasi baru tentang standar akreditasi rumah sakit yang menuntut peningkatan sarana, SDM dan sistem mutu.
- Kebijakan rujukan berjenjang yang kadang membatasi pasien langsung ke rumah sakit khusus.
- Keterbatasan dukungan anggaran daerah untuk pengembangan layanan subspesialis mata.

2. Aspek Sosial dan Demografi

- Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mata masih rendah, sehingga banyak pasien datang sudah dalam kondisi berat.
- Pertambahan penduduk usia lanjut meningkatkan kasus katarak, glaukoma dan degenerasi makula, sementara sumber daya belum seimbang.
- Persebaran penduduk yang luas dan kondisi geografis sulit (terutama di daerah) menghambat akses masyarakat terhadap layanan mata.

3. Aspek Ekonomi

- Daya beli masyarakat rendah, menyebabkan ketergantungan tinggi pada pembiayaan BPJS atau program subsidi.
- Fluktuasi ekonomi berdampak pada kemampuan rumah sakit meningkatkan fasilitas atau membeli alat kesehatan dengan teknologi tinggi.

4. Aspek Persaingan dan Kolaborasi

- Munculnya klinik mata swasta atau rumah sakit lain yang juga membuka layanan mata dengan promosi agresif.
- Persaingan dokter spesialis/subspesialis mata dan tenaga kesehatan antara rumah sakit pemerintah dan swasta.
- Kerja sama dengan jejaring rujukan belum optimal, sehingga rujukan pasien tidak maksimal.

5. Aspek Teknologi dan Lingkungan

- Perkembangan teknologi alat kesehatan mata sangat cepat, sementara anggaran pengadaan terbatas.
- Ketergantungan pada impor alat dan bahan habis pakai (misalnya lensa intraokular) membuat harga fluktuatif.
- Tantangan dalam menjaga keamanan data rekam medis elektronik (SIMRS).

2.5 Isu Strategis

Rencana Strategis RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai Misi Indonesia Sehat 2045. Penentuan isu-isu strategis RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan isu strategis yang akan ditangani RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Mata

Penguatan jejaring layanan dan program promotif–preventif untuk menurunkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan di Sumatera Selatan.

2. Peningkatan Mutu dan Standar Pelayanan Rumah Sakit

- Menjadikan RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menjadi Rumah Sakit Umum dengan kekhususan mata.
- Pengembangan sistem manajemen mutu, peningkatan kompetensi tenaga medis dan non-medis, serta optimalisasi tata kelola klinik sesuai standar akreditasi.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pelayanan

Modernisasi fasilitas dan sistem informasi rumah sakit untuk mendukung pelayanan cepat, tepat, dan efisien.

4. Penguatan SDM Spesialis, Subspesialis dan Tenaga Penunjang Kesehatan Mata

Penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan, sertifikasi

kompetensi, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan kesehatan.

5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat tentang Kesehatan Mata
Peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan kampanye edukatif seperti “Gerakan Sumsel Sehat Mata”, pemeriksaan gratis, dan kolaborasi dengan sekolah serta komunitas.
6. Penguatan Kemandirian Keuangan dan Manajemen BLUD
Optimalisasi kinerja keuangan BLUD dan inovasi layanan berorientasi pelanggan.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Rumah Sakit
Pengembangan infrastruktur pelayanan yang representatif, aman, dan berstandar rumah sakit khusus.

2.6 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah guna memastikan keselarasan antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Proses review dilakukan melalui penelaahan terhadap kesesuaian program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelaahan, secara umum program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 telah selaras dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan. Sebagian besar program dan kegiatan tidak mengalami perubahan yang signifikan baik dari sisi indikator kinerja maupun pagu indikatif anggaran dan tetap dipertahankan dalam hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi dan

operasional perangkat daerah, antara lain melalui kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Peningkatan Pelayanan BLUD. Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN telah dianggarkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan kegiatan pengadaan barang milik daerah diarahkan untuk mendukung pengembangan sarana pelayanan rumah sakit, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas layanan Unit Gawat Darurat dengan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa Ambulance.

Selain itu, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dialokasikan untuk mendukung kebutuhan tenaga penunjang pelayanan melalui pengadaan tenaga PPPK paruh waktu. Sementara itu, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD tetap dipertahankan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan khusus untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi. Program ini dinamakan "PENGGARIS" (penalaksanaan Gangguan Refraksi Bagi Siswa yang mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain melalui program pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta kegiatan pemeriksaan kesehatan mata bagi masyarakat usia produktif dan siswa sekolah termasuk pemberian bantuan kacamata bagi siswa yang mengalami gangguan penglihatan.

Secara keseluruhan, hasil review menunjukkan bahwa Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 telah mengakomodasi kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat. Hasil review tersebut selanjutnya dituangkan dalam Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Tabel 2.4. T-C.31.
Review terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SEMULA				Catatan Penting	MENJADI		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.	01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	DINKES	100%	36.706.085.650	APBD		100%	51.085.423.811	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.1	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	DINKES	100%	-	APBD	GAJI ASN DIALIHKAN KE DINKES PROV.SUMSEL	100%	-	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.1.1	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINKES	154 orang/bin	-	APBD		154 orang/bin	-	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.2	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSKMM	100%	1.257.525.650	APBD		100%	1.257.525.650	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.2.1	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	RSKMM	1 Unit Ambulance	1.257.525.650	APBD		1 Unit Ambulance	1.257.525.650	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.3	1.02.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSKMM	100%	448.560.000	APBD		100%	448.560.000	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.3.1	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	RSKMM	12 orang/bin	448.560.000	APBD		12 orang/bin	448.560.000	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.3	1.02.01.110	Peningkatan Pelayanan BLUD		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSKMM	100%	35.000.000.000	BLUD		100%	49.379.338.161	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
1.3.2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSKMM	1 unit kerja	35.000.000.000	BLUD		1 unit kerja	49.379.338.161	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
2	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSKMM dan SEKOLAH	100%	424.282.400	APBD		100%	424.282.400	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
2.1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Khusus untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi		Persentase Penyediaan Layanan Khusus untuk UKP Rujukan dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	RSKMM SEKOLAH	100%	424.282.400	APBD		100%	424.282.400	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-

2.1.1	1.02.02.102.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Siswa SMA Sederajat yang diperiksa dan Mendapatkan Layanan Gangguan Refraksi Mata	RSKHM dan SEKOLAH	1.222 Siswa	424.282.400	APBD	1.222 Siswa	424.282.400	MUTU PELAYANAN KESEHATAN	-
		Jumlah				37.130.368.050			51.509.706.211		

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Usulan tersebut diperoleh melalui proses penelaahan kebutuhan pelayanan perangkat daerah serta masukan dari pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil telaah terhadap usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, sebagian besar usulan program dan kegiatan telah terakomodasi dalam program Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Program yang diusulkan terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan dukungan operasional rumah sakit.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, usulan kegiatan diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain melalui kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta peningkatan pelayanan BLUD. Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN telah dianggarkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pegawai penerima sebanyak 154 orang per bulan.

Selanjutnya, usulan kegiatan pengadaan barang milik daerah difokuskan pada pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperuntukkan bagi Unit Gawat Darurat (UGD) guna mendukung layanan operasional dan meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan

pemerintahan daerah juga diusulkan untuk mendukung kebutuhan tenaga penunjang pelayanan melalui pembayaran gaji PPPK paruh waktu sebanyak 12 orang.

Pada aspek peningkatan pelayanan, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD tetap menjadi salah satu prioritas dalam mendukung keberlangsungan pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan mata yang optimal bagi masyarakat dengan dukungan sumber daya dan sarana yang memadai.

Selain itu, usulan dari pemangku kepentingan juga diarahkan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, khususnya melalui kegiatan penyediaan layanan kesehatan khusus untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi. Program ini mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui program Sumsel Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) serta kegiatan pemeriksaan kesehatan mata bagi masyarakat usia produktif dan siswa sekolah.

Melalui kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif, ditargetkan sebanyak 1.222 siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata serta bantuan kacamata bagi siswa yang mengalami gangguan penglihatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan gangguan penglihatan sejak usia dini.

Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan telah selaras dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesehatan, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat. Selengkapnya di gambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah :
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

No	Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan	Catatan Penting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINKES	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	51.509.706.211	
1.1	01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINKES	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	Sudah dianggarkan melalui Dinas Kesehatan
1.1.1	01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINKES	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 orang/bln	-	
1.2	01.01.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSKMM	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.257.525.650	Untuk pengadaan kendaraan ambulance
1.2.1	01.01.7.0009	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSKMM	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit Ambulance	1.257.525.650	
1.3	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSKMM	Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	448.560.000	Diperuntukkan bagi gaji PPPK Paruh waktu sebanyak 12 orang.
1.3.1	01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSKMM	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan (12 orang/bln)	448.560.000	
1.4	01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSKMM	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	49.379.338.161	Kenaikan target pendapatan menjadi 42 M ditambah dengan SILPA Tahun

1.4.1	01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSKMM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	49.379.338.161	2025
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSKMM dan SEKOLAH	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	424.282.400	Melanjutkan program Sumsel Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), Pemeriksaan kesehatan mata bagi usia produktif dan memberikan bantuan kacamata gratis bagi anak-anak sekolah yang mengalami gangguan penglihatan.
2.1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Khusus untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSKMM dan SEKOLAH	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Khusus untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	424.282.400	
2.1.1	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	RSKMM dan SEKOLAH	Jumlah siswa SMA sederajat yang diperiksa dan Mendapatkan Layanan Gangguan Refraksi Mata	1.222 siswa	424.282.400	

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 900.1.15.5–1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan uraian :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.3 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Penyediaan Layanan Kesehatan Khusus untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Perumusan kegiatan pada setiap program telah menyinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai

pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif kegiatan dapat dilihat pada diagram alir berikut :

Tabel 3.1. RINCIAN KOMPONEN BELANJA
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
OPD : OBK RS KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

N O	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5=(4-3)
I.	BELANJA OPERASI	28.872.842.400	42.252.180.561	13.379.338.161
1.	Belanja Pegawai :	-	-	-
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	-	-	-
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	-	-	-
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	-	-	-
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	-
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	-	-	-
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	-	-	-
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	-	-	-
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	-	-	-
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	-	-	-
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	-	-	-
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	-	-	-
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	-	-	-
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-

	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN			-
	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)			-
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD			-
	3) Belanja Pegawai BOS	-	-	-
	4) Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	-	-	-
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	-	-	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	28.872.842.400	42.252.180.561	13.379.338.161
	APBD	872.842.400	872.842.400	-
	BLUD	28.000.000.000	41.379.338.161	13.379.338.161
3.	Belanja Bunga	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	-
5.	Belanja Hibah	-	-	-
	1) Hibah Kepada.....	-	-	-
	2) Hibah Kepada.....	-	-	-
	3) Hibah Kepada.....	-	-	-
	4) Hibah Kepada.....	-	-	-
	5) dst.....	-	-	-
6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	1) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	2) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	3) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	4) Bantuan Sosial Kepada.....	-	-	-
	5) dst.....	-	-	-
II.	BELANJA MODAL	8.257.525.650	9.257.525.650	1.000.000.000
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-
	APBD	-	-	-

	BLUD	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.957.525.650	6.957.525.650	-
	APBD	1.257.525.650	1.257.525.650	-
	BLUD	5.700.000.000	5.700.000.000	-
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
	APBD			-
	BLUD	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
	APBD	-	-	-
	BLUD	-	-	-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	300.000.000	300.000.000
	APBD	-		-
	BLUD		300.000.000	300.000.000
f.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	300.000.000	-	(300.000.000)
	APBD	-	-	-
	BLUD	300.000.000		(300.000.000)
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-
IV.	BELANJA TRANSFER	-	-	-
1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
TOTAL BELANJA (I+II+III+IV)		37.130.368.050	51.509.706.211	14.379.338.161

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RS Khusus Mata Masyarakat (RSKMM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.

Renja Perubahan 2026 memiliki kedudukan strategis sebagai acuan utama dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RSKMM secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Meskipun disusun sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun, Renja ini dirancang agar tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, pencapaian kinerja RSKMM sangat dipengaruhi oleh dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, sinergi kebijakan dari pemerintah daerah sangat krusial, khususnya dalam hal dukungan penganggaran, promosi pelayanan, dan perumusan kebijakan program kesehatan mata.

Adapun total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan layanan kesehatan mata pada Renja Perubahan tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 51.509.706.211,- (Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah)**. Anggaran ini direncanakan untuk membayar sisa kewajiban yang belum selesai tahun sebelumnya dan untuk pengembangan ruangan kamar operasi. Sebagai langkah antisipatif apabila pagu indikatif yang disetujui nantinya tidak mencapai target proyeksi kebutuhan tersebut, RSKMM Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan strategi penyesuaian melalui penerapan skala prioritas belanja. Skema rasionalisasi anggaran akan difokuskan untuk mengamankan kegiatan operasional esensial

pelayanan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program prioritas strategis rumah sakit. Penyesuaian akan diberlakukan secara selektif pada kegiatan pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan klinis, dengan tetap menjaga komitmen terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Renja Perubahan RSKMM Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit ke dalam perencanaan strategis yang komprehensif. Perencanaan yang matang ini akan dapat direalisasikan secara optimal melalui komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen organisasi, baik pada tahap penyusunan, sosialisasi, maupun implementasi.

Melalui penerapan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*), diharapkan seluruh sasaran pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan di RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Palembang, 24 Agustus 2026
Direktur RS Khusus Mata Masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Lady Kavotiner, Sp.M., MARS
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 19800924 200803 2 001